



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI V DPR RI  
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,  
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, DAN BPLS)**

---

Tahun Sidang	: 2010 – 2011
Masa Sidang	: III
Rapat	: Ke-
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Selasa, 8 Maret 2011
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 13.15 WIB s.d 17.45 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V)
Acara	: 1. Membahas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK; 2. Potret dan evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2010; 3. Persiapan pelaksanaan APBN tahun 2011; dan 4. Evaluasi kapasitas untuk melaksanakan APBN tahun 2011
Ketua Rapat	: Drs. Yoseph Umarhadi, MSi, MA
Sekretaris	: Dra. Hani Yuliasih
Hadir Anggota	: dari 52 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Kepala BAPEL BPLS dan Deputi Perencanaan BP-BPWS beserta jajaran.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat dibuka pukul 13.15 WIB, kemudian diskors selama 30 menit. Setelah kuorum terpenuhi skors dicabut dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua menyampaikan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Kepala BPLS dan Kepala BP-BPWS yang diwakili Deputi Perencanaan BP-BPWS pada hari ini adalah untuk membahas mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK; potret dan evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2010; persiapan pelaksanaan APBN tahun 2011; dan evaluasi kapasitas untuk melaksanakan APBN tahun 2011.
3. Ketua mempersilakan kepada Kepala BPLS dan Deputi Perencanaan BP-BPWS untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua mempersilakan kepada anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan tanggapan dan pertanyaan.

**II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

1. Komisi V DPR RI mendesak BAPEL-BPLS untuk segera menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan khususnya penyelesaian masalah jual beli tanah dan bangunan dengan tetap mengedepankan rasa keadilan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Komisi V DPR RI meminta BAPEL BPLS bekerja lebih keras untuk meningkatkan kinerja penyerapan anggaran di tahun 2011 dan memperbaiki perencanaan penganggaran ditahun anggaran berikutnya.
3. Komisi V DPR RI mendesak BAPEL-BPLS untuk menyelesaikan tugas di bidang infrastruktur pada tahun anggaran 2011, antara lain :
  - a. Relokasi Jalan Arteri Porong - Sidoarjo; dan
  - b. Penanganan sistem pengaliran lumpur ke laut melalui Kali Porong.
4. Komisi V DPR RI mendesak BP-BPWS untuk melakukan sinkronisasi kewenangan dengan Pemerintah Daerah mengacu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Perpres No. 27 Tahun 2008.
5. Komisi V DPR RI mendesak BP-BPWS untuk mematangkan kelembagaannya termasuk SDM dan struktur organisasi, serta program kerja yang sesuai dengan Perpres No 27 tahun 2008.
6. Komisi V DPR RI mendesak BP-BPWS untuk bergerak lebih cepat mengatasi berbagai permasalahan yang belum terselesaikan pada TA. 2010 antara lain :
  - a. Rencana Induk untuk memfasilitasi percepatan pengembangan wilayah Suramadu;
  - b. Rencana pengembangan kawasan di kaki Jembatan Suramadu dan kawasan khusus Madura;
  - c. Pembebasan lahan; dan
  - d. Penanganan PKL.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.45 WIB.

Jakarta, 8 Maret 2011

**KETUA RAPAT,**

**ttd**

**DRS. YOSEPH UMARHADI, MSi, MA**

**KEPALA BADAN PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN  
LUMPUR SIDOARJO,**

**ttd**

**SUNARSO**

**DEPUTI PERENCANAAN BADAN PELAKSANA  
BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH  
SURABAYA – MADURA,**

**ttd**

**Dr. Ir. MAURITS PASARIBU, MSc**